

ABSTRAK

M. AFIF

Pinjaman uang tersebut lazimnya diperoleh dengan meminjam kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya seperti koperasi.

Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan hukum atas perjanjian pengikatan hutang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan? Bagaimana akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian pengikatan hutang terhadap masing-masing pihak dalam perjanjian? Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pembatalan perjanjian hutang dalam jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum atas perjanjian pengikatan hutang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat 5 (lima) unsur-unsur perjanjian, Kata sepakat dua pihak atau lebih Kata sepakat itu merupakan suatu pernyataan akan kehendak dari beberapa pihak. Kesepakatan yang dicapai harus bergantung pada para pihak Kesepakatan dibuat jika salah satu pihak menerima tawaran dari pihak lain atas sesuatu, yang berarti para pihak mencapai kesepakatan. Akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian pengikatan hutang terhadap masing-masing pihak dalam perjanjian batal Demi Hukum Karena Syarat Perjanjian Formil Tidak Terpenuhi. Karena Syarat Objektif Sahnya Perjanjian Tidak Terpenuhi Syarat objektif sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu untuk sahnya perjanjian harus ada suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Pertimbangan hakim atas tindakan pembatalan perjanjian hutang dalam jual beli dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak

Kata Kunci : Pembatalan, Perjanjian, Pengikatan Hutang.

ABSTRACT

M. AFIF

These money loans are usually obtained by borrowing from banking institutions or other financing institutions such as cooperatives.

The problem is: What is the legal regulation of debt binding agreements which are regulated in the provisions of statutory regulations? What are the legal consequences of canceling a debt binding agreement for each party to the agreement? How do judges consider the act of canceling debt agreements in buying and selling in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 326 K/Pdt/2023?

This research is descriptive in nature with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science with an emphasis on secondary data. To complete the data, this is done by collecting relevant materials and conducting literature studies, after which the data will be analyzed juridically.

It is concluded that the legal regulation of debt binding agreements regulated in statutory provisions contains 5 (five) elements of the agreement. An agreement between two or more parties. The agreement is a statement of the will of several parties. The agreement reached must depend on the parties. An agreement is made if one party accepts an offer from another party for something, which means the parties have reached an agreement. The legal consequences of canceling a debt binding agreement for each party in the agreement are void by law because the formal agreement requirements are not fulfilled. Because the objective conditions for the validity of the agreement are not fulfilled. The objective conditions for the validity of the agreement are regulated in Article 1320 of the Civil Code, namely that for the agreement to be valid there must be a certain thing and a lawful cause. The judge's considerations regarding the act of canceling the debt agreement in the sale and purchase in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 326 K/Pdt/2023, the reasons for the cassation are a repetition of the arguments, because the examination at the cassation level only concerns the existence of errors in the application of the law, the existence of violations of the law which applies, there is negligence in fulfilling the requirements required by statutory regulations which threatens such negligence with the cancellation of the relevant decision or if the Court has no authority or exceeds the limits of its authority, it turns out that the decision of the Jakarta High Court in this case does not conflict with the law and/or law, then the cassation petition submitted by the cassation petitioners must be rejected

Keywords: Cancellation, Agreement, Debt Binding.